

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshori, Imam, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman “Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan”*, Setara Press, Malang.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djohansjah, J, 2008, *Reformasi Mahakamah Agung “Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman”*, Kesaint Blanc, Bekasi Timur.
- Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah “Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Hukum dan Kesatuan”*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Jeddawi, Murtir, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah “Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen, Kepegawaian, dan Peraturan Daerah”*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Jurdi, Fajlurrahman, 2007, *Komisi Yudisial “Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim”*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Komisi Yudisial, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2014, *Problematika Hukum dan Peradilan*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2015, *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Matutu, Mustamin, DG, dkk, 1999, *Mandat, Delegasi, dan Attribusi dalam Impelementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Rishan, Idul, 2013, *Komisi Yudisial “Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan”*, Genta Press, Yogyakarta.

Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum ‘Akar Filosofis’*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Suadi, Amran, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta.

Sumadi, Fadlil, Ahmad, 2013, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan ‘Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang.

Sumardjono, Maria, S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sunarto, 2013, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Hakim Yang Dihubungkan Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Thohari, A., Ahsin, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Nomor 89 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 139 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran

Negara Nomor 106 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5207.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Nomor 112.

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

C. Internet

Edwardi, “Dua Hakim Tipikor Bengkulu Tertangkap Tangan KPK”, <http://bangka.tribunnews.com/2016/05/24/dua-hakim-tipikor-bengkulu-tertangkap-tangan-kpk>, diakses 3 November 2016.

Faundra Afandi, Rezza, “Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim-Hakim Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial”, http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/19860/Unlok-k-gdlhub-gdl-rezzafaund-11566-1-rezzafa-i_1.pdf?sequence=1, diakses 30 Juni 2017.

Gatra, Sandro, “Jajak Pendapat “Kompas”: Reformasi Hukum Berjalan Setengah Hati”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/19/09043131/Jajak.Pendapat.Kompas.Reformasi.Hukum.Berjalan.Setengah.Hati?page=all>, diakses 3 Mei 2017.

Hukum Online, “Perbedaan Kantor Cabang dan Perwakilan”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6946/perbedaan-kantor-cabang-dan-perwakilan>, diakses 15 Juli 2017.

Idhom, Addi M, “Ketua MA Mengeluh Indonesia Kekurangan 4.858 Hakim”, <http://www.pn-lubuksikaping.go.id/article-ketua-ma-mengeluh-indonesia-kekurangan-4-858-hakim.html>, diakses 22 April 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti kata adil”, <http://kbbi.co.id/arti-kata/adil>, diakses 6 Desember 2016.

_____, “Arti kata hubung”, <http://kbbi.web.id/hubung>, diakses 6 April 2017.

_____, “Arti kata kantor perwakilan”, <http://kbbi.kata.web.id/kantor-perwakilan/>, diakses 6 Desember 2016.

_____, “Arti kata urgensi”, <http://kbbi.web.id/urgensi>, diakses 5 Desember 2016.

_____, “Arti kata wakil”, <http://kbbi.web.id/wakil>, diakses 5 Desember 2016.

Komisi Yudisial, “KY Lantik Empat Petugas Penghubung Wilayah Maluku”, <http://www.komisiyudisial.go.id/berita-54389-ky-lantik-empat-petugas-penghubung-wilayah-maluku.html>, diakses 3 November 2016.

_____, “KY Minta Masukan Jejaring di Medan”, <http://www.komisiyudisial.go.id/berita-54714-ky-minta-masukan-jejaring-di-medan.html>, diakses 19 Maret 2017.

_____, “Penghubung Komisi Yudisial”, <http://www.komisiyudisial.go.id/statis-86-penghubung-komisi-yudisial.html>, diakses 3 November 2016.

_____, “Sepanjang 2016, KY Rekomendasikan Sanksi Terhadap 87 Hakim”, <http://www.komisiyudisial.go.id/berita-54689-sepanjang-2016-ky-rekomendasikan-sanksi-terhadap-87-hakim.html>, diakses 18 Maret 2017.

- Lumanauw, Novy, “Ini Hakim dan Pegawai Pengadilan yang terlibat Korupsi 2012-2016”, <http://www.beritasatu.com/hukum/414374-ini-hakim-dan-pegawai-pengadilan-yang-terlibat-korupsi-20122016.html>, diakses 23 April 2017.
- Masripattunnisa, “Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dan Pengaruhnya terhadap Kekuasaan Kehakiman”, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25044/1/Masripattunnisa.FSH.pdf>, diakses 30 Juni 2017.
- Mohammad, Yandi, “Menutupi kekurangan jumlah hakim di Indonesia”, <https://beritagar.id/artikel/berita/menutupi-kekurangan-jumlah-hakim-di-indonesia>, diakses 22 April 2017.
- Pratiwi, Priska Sari, “Ketua MA: Mayoritas Pejabat Peradilan Bermasalah Adalah Hakim”, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161229092625-12-182826/ketua-ma-mayoritas-pejabat-peradilan-bermasalah-adalah-hakim/>, diakses 27 April 2017.
- Ramadhani, Tito, “Komisi Yudisial Terima 3.242 Laporan Masyarakat Sepanjang Tahun 2015”, <http://www.tribunnews.com/regional/2016/03/16/komisi-yudisial-terima-3242-laporan-masyarakat-sepanjang-tahun-2015>, diakses 3 November 2016.
- Sari, Novita Intan, “Banyak keluhan warga, anggaran KY dan Komnas HAM layak disunat”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/banyak-keluhan-warga-anggaran-ky-dan-komnas-ham-layak-disunat.html>, diakses 18 Maret 2017.
- Simanjuntak, Rico Afrido, “ICW: Sudah 20 Lebih Hakim Dijerat Kasus Korupsi”, <https://nasional.sindonews.com/read/1179157/13/icw-sudah-20-lebih-hakim-dijerat-kasus-korupsi-1486884585>, diakses 27 April 2017.